



Determinan Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Kebumen dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Moderating

Iftitah Anggraeni^{1*}, Sukirman²

^{1,2} Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI: 10.15294/baej.v2i3.56567

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima, 7 November 2021
Disetujui, 8 November 2021
Dipublikasikan, 31 Desember 2021

Keywords:

Competence; Job Discipline; Internal Communication; Employee Performance.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen sebanyak 50 OPD dan sampel yang digunakan adalah 35 OPD, diambil dengan teknik cluster random sampling. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi moderasi (MRA). Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of the use of information technology, competence of local government apparatus, and internal control systems on the performance of government agencies with community participation as a moderating variable. The population of this research is Regional Apparatus Organizations in Kebumen Regency as many as 50 OPD and the sample used is 35 OPD, taken by cluster random sampling technique. The data analysis method used descriptive analysis and moderated regression analysis (MRA). The results showed: the use of information technology, competence of local government apparatus, and internal control systems simultaneously have a positive significant on the performance of government agencies with community participation as a moderating variable.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Selain itu, maksud lain dari adanya otonomi daerah adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global.

Pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut (Ilah dan Yanto, 2016). Tuntutan tersebut diajukan sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara negara kepada masyarakat atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Suatu pemerintahan yang memperhatikan dan responsif terhadap kehendak dan aspirasi masyarakat serta melibatkan partisipasi mereka dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai aspek kepentingan masyarakat akan sangat berpotensi mengurangi kesenjangan yang semakin melebar disegala bidang yang terjadi di masyarakat. Peran dan tanggung jawab dalam pembangunan bukan lagi hanya dimiliki pemerintah pusat namun juga menjadi milik dan harus merupakan prakarsa masing-masing daerah. Sehingga begitu penting bagi daerah untuk selalu meningkatkan kinerja pelayanan publik yang merupakan bagian akibat dari adanya

otonomi daerah. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu peranan yang menunjukkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kinerja instansi pemerintah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan pengguna anggaran dengan kuantitas yang diukur. Kinerja suatu organisasi dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi.

Pada tataran operasionalnya kinerja pelayanan publik di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan. Fenomena ini terlihat dari keluhan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok organisasi ketika mengurus keperluan, kebutuhan tertentu pada instansi pemerintah. Kebutuhan mereka kurang cepat direspon, waktu penyelesaiannya lama, birokrasi yang berbelit-belit, informasi kurang jelas, dan biaya yang dikeluarkan lebih dari yang ditentukan. Di sepanjang tahun 2017, pemerintah daerah menjadi lembaga dengan pelayanan publik terburuk. Menurut laporan tahunan Ombudsman RI, terdapat 3.445 laporan masyarakat yang mengadukan pemerintah daerah. Jumlah itu setara dengan 41,69% dari seluruh laporan masyarakat kepada Ombudsman RI.

Menurut Mohyi (1999) bahwa keberhasilan organisasi dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern antara lain struktur organisasi dan teknologi yang

digunakan, kualitas dan perilaku sumber daya manusia, budaya yang ada dalam organisasi, serta kebijakan dan praktek manajemen. Sedangkan faktor ekstern berupa perilaku yang dari luar lingkungan organisasi baik itu yang dapat dikontrol organisasi maupun yang tidak dapat dikontrol.

Pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal merupakan faktor intern yang dapat mendorong kinerja instansi pemerintah. Selain ketiga faktor tersebut, terdapat pula faktor partisipasi masyarakat yang merupakan faktor ekstern. Tilaar (2009) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Rubin (1996) menjelaskan bahwa adanya partisipasi masyarakat akan meningkatkan tanggung jawab serta kinerja organisasi pemerintah daerah. Masyarakat yang menyampaikan keluhan dan saran terhadap pembangunan di daerahnya dan disampaikannya kepada pemerintah daerah, yang mana keluhan dan saran tersebut mempunyai tujuan yang sama guna untuk mensejahterakan masyarakat. Dari adanya keikutsertaan masyarakat tersebut, maka akan didapatkan keputusan yang lebih realistis sehingga tercipta kesesuaian tujuan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Temuan Aziz (2014) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja organisasi, hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kinerja organisasi. Leach-López, dkk. (2008) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa terdapat hubungan langsung antara

partisipasi anggaran dan kinerja. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Raharja, dkk. (2015) menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Oleh karena itu, faktor partisipasi masyarakat yang merupakan faktor ekstern organisasi dapat menjadi ide baru penelitian dengan asumsi bahwa partisipasi masyarakat dapat memperkuat atau memperlemah hubungan dari faktor-faktor intern yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk: (a) menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah secara parsial, (b) menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja instansi pemerintah secara parsial, (c) menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah secara parsial, (d) menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah secara parsial dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating, (e) menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja instansi pemerintah secara parsial dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating, (f) menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah secara parsial dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating, (g) menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah secara simultan dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Kebumen sebanyak 50

OPD dan diputuskan sampel dalam penelitian ini adalah 35 OPD. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Pengumpulan data dilaksanakan melalui kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden yakni Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural di tiap OPD yang menjadi sampel penelitian. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil deskriptif variabel penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Deskriptif Kinerja Instansi Pemerintah

Rentang	F	Persentase	Kriteria
68 – 80	2	6%	Sangat Tinggi
55 – 67	31	88%	Tinggi
42 – 54	2	6%	Cukup Tinggi
29 – 41	0	0%	Rendah
16 – 28	0	0%	Sangat Rendah
Jumlah	35	100%	Tinggi

Sumber: Data diolah

Berdasar pada tabel 1 secara umu dari 35 OPD yang menjadi sampel penelitian menilai bahwa pencapaian kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen di kriteria tinggi. Terdapat dua OPD atau sebesar 6% yang menilai kinerja instansi pemerintah pada kriteria sangat tinggi, 31 OPD atau sebesar 88% menilai kinerja instansi pemerintah pada kriteria tinggi, dan 2 OPD atau sebesar 6% menilai pada kriteria cukup tinggi.

Tabel 2. Deskriptif Pemanfaatan Teknologi Informasi

Rentang	F	Persentase	Kriteria
35 – 41	4	11%	Sangat Tinggi
28 – 34	31	89%	Tinggi
21 – 27	0	0%	Cukup Tinggi
14 – 20	0	0%	Rendah
7 – 13	0	0%	Sangat Rendah
Jumlah	35	100%	Tinggi

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui dari 35 OPD di Kabupaten Kebumen bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi menghasilkan skor rata-rata sebesar 31,89 yang berada pada kriteria tinggi. Sebanyak empat OPD atau sebesar 11% dalam kriteria sangat tinggi dan 31 OPD atau sebesar 89% berada dalam kriteria tinggi.

Tabel 3. Deskriptif Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Rentang	F	Persentase	Kriteria
47 – 55	13	37%	Sangat Tinggi
38 – 46	22	63%	Tinggi
29 – 37	0	0%	Cukup Tinggi
20 – 28	0	0%	Rendah
11 – 19	0	0%	Sangat Rendah
Jumlah	35	100%	Tinggi

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah dari 35 OPD menghasilkan skor rata-rata sebesar 45,69 yang berada pada kriteria tinggi. Sebanyak 13 OPD atau sebesar 37% dalam kriteria sangat tinggi dan 22 OPD atau sebesar 63% dalam kriteria tinggi.

Tabel 4. Deskriptif Sistem Pengendalian Internal

Rentang	F	Persentase	Kriteria
128 – 152	5	14%	Sangat Tinggi
103 – 127	30	86%	Tinggi
78 – 102	0	0%	Cukup Tinggi
53 – 77	0	0%	Rendah
28 – 52	0	0%	Sangat Rendah
Jumlah	35	100%	Tinggi

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel sistem pengendalian internal dari 35 OPD menghasilkan skor rata-rata sebesar 120,14 yang berada pada kriteria tinggi. Sebanyak lima OPD atau sebesar 14% berada dalam kriteria sangat tinggi dan 30 OPD atau sebesar 86% pada kriteria tinggi.

Tabel 5. Deskriptif Partisipasi Masyarakat

Rentang	F	Persentase	Kriteria
44 – 52	1	3%	Sangat Tinggi
35 – 43	34	97%	Tinggi
26 – 34	0	0%	Cukup Tinggi
17 – 25	0	0%	Rendah
8 – 16	0	0%	Sangat Rendah
Jumlah	35	100%	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa variabel partisipasi masyarakat dari 35 OPD menghasilkan skor rata-rata se-

sar 39,49 yang berada pada kriteria tinggi. Sebanyak satu OPD atau sebesar 3% berada pada kriteria sangat tinggi dan 34 OPD atau sebesar 97% berada pada kriteria tinggi.

Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan dengan menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator (Ghozali 2016: 219). Analisis ini untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model uji nilai selisih mutlak dari variabel independen.

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regres-	353,305	7	50,472	8,181	,000 ^b
Residual	166,580	27	6,170		
Total	519,886	34			

Sumber: data diolah

Hasil Uji F pada tabel 6 menunjukkan nilai F hitung sebesar 8,181 dengan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian Ha7 yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi

informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating dinyatakan diterima.

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Parsial

COEFFICIENTS ^A					
MODEL	Unstandardized Coefficients		Standardized Coef-	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	59,432	,969		61,350	,000
Zscore(PTI)	1,753	,677	,448	2,590	,015
Zscore(KAPD)	,002	,696	,001	,003	,997
Zscore(SPI)	,808	,810	,207	,997	,328
Zscore(PM)	,414	,722	,106	,573	,571
AbsX1_X4	1,329	,918	,193	1,449	,159
AbsX2_X4	2,088	,866	,321	2,410	,023
AbsX3_X4	-2,714	1,151	-,294	-2,358	,026

A. Dependent Variable: KIP

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 7 menghasilkan koefisien untuk variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi (X1) = 1,753, kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2) = 0,002, sistem pengendalian internal (X3) = 0,808, partisipasi masyarakat (X4) = 0,414, interaksi pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat (X1 - X4) = 1,329, interaksi kompetensi aparatur pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat (X2 - X4) = 2,088, dan interaksi sistem pengendalian intern dan partisipasi masyarakat (X3 - X4) = -2,714 dengan nilai konstanta 59,432. Sehingga didapatkan persamaan regresi moderasi (Moderated Regression Analysis/MRA) dengan uji nilai selisih mutlak sebagai berikut:

$$\text{KIP} = 59,432 + 1,753\text{PTI} + 0,002\text{KAPD} + 0,808\text{SPI} + 0,414\text{PM} + 1,329(\text{PTI} - \text{PM}) + 2,088(\text{KAPD} - \text{PM}) - 2,714(\text{SPI} - \text{PM}) + e$$

Keterangan:

KIP : Kinerja Instansi Pemerintah
 PTI : Pemanfaatan Teknologi Informasi
 KAPD : Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah
 SPI : Sistem Pengendalian Internal
 PM : Partisipasi Masyarakat
 e : Variabel error

Nilai konstanta sebesar 59,432 berarti jika variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1), kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2), sistem pengendalian internal (X3), partisipasi masyarakat (X4), dan masing-masing variabel interaksi memiliki nilai 0, maka kinerja instansi pemerintah (Y) bernilai 59,432.

Hasil uji statistik dengan SPSS pada variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1) diperoleh t hitung 2,590 dengan signifikansi $0,010 < 0,05$, hal ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi

pemerintah. Koefisien beta bernilai positif menunjukkan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah adalah berpengaruh positif, sehingga Ha1 yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah dinyatakan diterima. Nilai koefisien X1 sebesar 1,753 berarti jika variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1) naik satu satuan dengan variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2), sistem pengendalian internal (X3), partisipasi masyarakat (X4) dan variabel interaksi nilainya tetap, maka kinerja instansi pemerintah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1,753.

Variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2) diperoleh t hitung 0,003 dengan signifikansi $0,997 > 0,05$, hal ini berarti bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Koefisien beta bernilai positif menunjukkan pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja instansi pemerintah adalah positif, sehingga Ha2 yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah dinyatakan ditolak. Nilai koefisien X2 sebesar 0,002 berarti jika variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2) naik satu satuan dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1), sistem pengendalian internal (X3), partisipasi masyarakat (X4) dan variabel interaksi nilainya tetap, maka kinerja instansi pemerintah (Y) tidak akan mengalami kenaikan atau penurunan.

Variabel sistem pengendalian internal (X3) diperoleh t hitung 0,997 dengan signifikansi $0,328 > 0,05$, hal ini berarti bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi

pemerintah. Koefisien beta bernilai positif menunjukkan pengaruh sistem pengendalian internal.

Pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah adalah positif, sehingga Ha3 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah dinyatakan ditolak. Nilai koefisien X3 sebesar 0,808 berarti jika variabel sistem pengendalian internal (X3) naik satu satuan dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1), kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2), partisipasi masyarakat (X4) dan variabel interaksi nilainya tetap, maka kinerja instansi pemerintah (Y) tidak akan mengalami kenaikan atau penurunan.

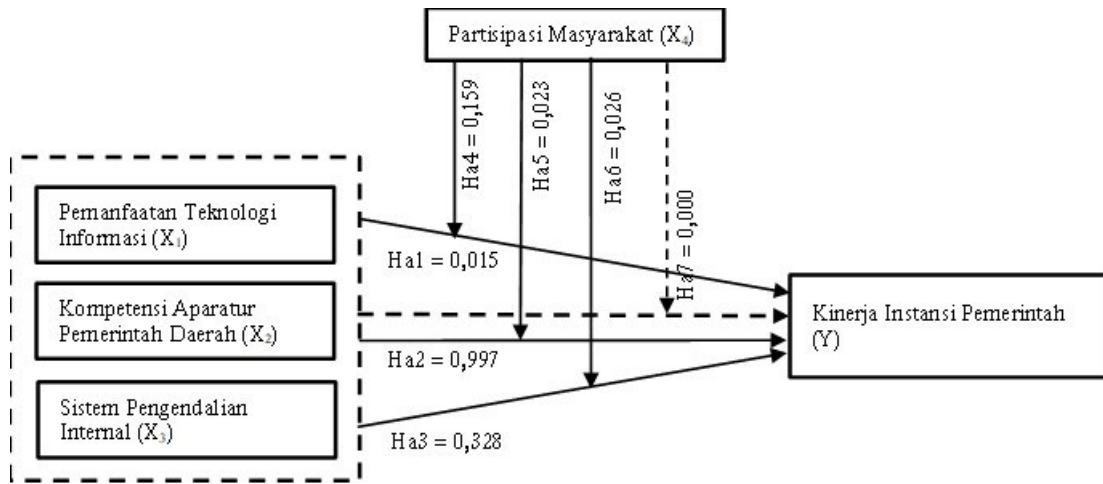
Interaksi pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat diperoleh t hitung 1,449 dengan signifikansi $0,159 > 0,05$, hal ini berarti bahwa interaksi pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Koefisien beta bernilai positif menunjukkan pengaruh interaksi pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah adalah positif, sehingga Ha4 yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating dinyatakan ditolak. Nilai koefisien interaksi (X₁-X₄) sebesar 1,329 berarti jika interaksi (X₁-X₄) naik satu satuan dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1), kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2), sistem pengendalian internal (X3), partisipasi masyarakat (X4) dan variabel interaksi nilainya tetap, maka kinerja instansi pemerintah (Y) tidak akan mengalami kenaikan atau penurunan.

Interaksi kompetensi aparatur pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat diperoleh t hitung 2,410 dengan signifikansi $0,023 < 0,05$, hal ini berarti bahwa interaksi kompetensi aparatur pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Koefisien beta bernilai positif menunjukkan pengaruh interaksi kompetensi aparatur pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah adalah positif, sehingga Ha5 yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating dinyatakan diterima. Nilai koefisien interaksi (X₂-X₄) sebesar 2,088 berarti interaksi (X₂-X₄) naik satu satuan dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1), kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2), sistem pengendalian internal (X3), partisipasi masyarakat (X4) dan variabel interaksi nilainya tetap, maka kinerja instansi pemerintah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 2,0088.

Interaksi sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat diperoleh t hitung -2,358 dengan signifikansi $0,026 < 0,05$, hal ini berarti bahwa interaksi sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Koefisien beta bernilai negatif menunjukkan pengaruh interaksi sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah adalah negatif, sehingga Ha6 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating dinyatakan ditolak. Nilai koefisien interaksi (X₃-X₄) sebesar -2,714 berarti jika interaksi (X₃-X₄) naik satu satuan

dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1), kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2), sistem pengendalian internal (X3), partisipasi masyarakat (X4) dan variabel interaksi nilainya tetap, maka kinerja instansi pemerintah (Y)

dalian internal (X3), partisipasi masyarakat (X4) dan variabel interaksi nilainya tetap, maka kinerja instansi pemerintah (Y)



Gambar 1. Hasil Model Penelitian

Tabel 8. Koefisien Determinasi Simultan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.824 ^a	.680	.597	2,48388

Sumber: data diolah

akan mengalami penurunan sebesar 2,714.

Tabel 8 menunjukkan Adjusted R Square sebesar 0,597 yang berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal, dan variabel interaksi secara simultan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah sebesar 59,7%, sedangkan sisanya sebesar 40,3% di-

Tabel 9. Koefisien Determinasi Parsial

Model	Correlations		
	Zero-order	Partial	Partial
1 (Constant)			
Zscore(PTI)	,674	,446	,282
Zscore(KAPD)	,547	,001	,000
Zscore(SPI)	,524	,188	,109
Zscore(PM)	,464	,110	,062
AbsX1_X4	,363	,269	,158
AbsX2_X4	,396	,421	,263
AbsX3_X4	-,077	-,413	-,257

a. Dependent Variable: KIP

Sumber: data diolah

mempengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Koefisien determinasi parsial (r²) untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar $[0,446]^2 \times 100\% = 19,89\%$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kinerja instansi pemerintah sebesar 19,89%. Koefisien determinasi parsial (r²) untuk variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah sebesar $[0,001]^2 \times 100\% = 0,001\%$. Karena hasil uji signifikansi parsial menunjukkan signifikansi $0,997 > 0,05$ maka hasil uji parsial tidak memiliki makna pengaruh atau hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Koefisien determinasi parsial (r²) untuk variabel sistem pengendalian internal sebesar $[0,188]^2 \times 100\% = 3,53\%$. Karena hasil uji signifikansi parsial menunjukkan signifikansi $0,328 > 0,05$ maka hasil uji parsial tidak memiliki makna pengaruh atau hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Koefisien determinasi parsial (r^2) untuk variabel interaksi pemanfaatan teknologi informasi sebesar $[0,269]^2 \times 100\% = 7,24\%$. Karena hasil uji signifikansi parsial menunjukkan signifikansi $0,159 > 0,05$ maka hasil uji parsial tidak memiliki makna pengaruh atau hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel interaksi pemanfaatan teknologi informasi dengan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Koefisien determinasi parsial (r^2) untuk variabel interaksi kompetensi aparatur pemerintah daerah sebesar $[0,421]^2 \times 100\% = 17,72\%$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel interaksi kompetensi aparatur pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah sebesar 17,72%. Koefisien determinasi parsial (r^2) untuk variabel interaksi sistem pengendalian internal sebesar $[-0,413]^2 \times 100\% = 17,06\%$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel interaksi sistem pengendalian internal dengan partisipasi masyarakat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah sebesar 17,06%.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan hipotesis pertama diterima. Dibuktikan dengan hasil uji signifikansi parsial menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,015 yang berarti kurang dari 0,05. Koefisien beta yang bernilai positif berarti arah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah adalah positif. Secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi

mempengaruhi kinerja instansi pemerintah sebesar 19,89%. Penelitian ini juga didukung dengan data empiris yang menunjukkan dari 35 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi menghasilkan skor rata-rata sebesar 31,89 yang berada pada kriteria tinggi.

Berdasarkan *Task-Technology Fit Theory*, yaitu teori yang menyatakan kesesuaian antara kemampuan teknologi dengan tuntutan pekerjaan, atau kemampuan teknologi untuk mendukung pekerjaan. Oei (2016) mendasarkan model ini pada gagasan bahwa ketika karakteristik tugas pengguna dan karakteristik sistem informasi terintegrasi dengan baik, maka penggunaan sistem dan kinerja pengguna akan meningkat. Segala aktivitas Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka pelayanan publik telah dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan bantuan teknologi informasi, pengolahan data telah diatur sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan dapat lebih tepat waktu dan dengan biaya yang masih dibawah manfaat yang dihasilkan dibandingkan hanya dengan manual. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dengan didukung oleh keahlian dalam mengoperasikannya terbukti dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Kebumen. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi instansi pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi, maka semakin tinggi kinerja yang dapat diperolehnya.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Djalil, dkk (2017) bahwa teknologi informasi berdampak pada kinerja instansi pemerintah Kota Banda Aceh. Selain itu Trihapsoro (2015) juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi merupakan faktor yang menjadi pendorong kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Boyolali

dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai koefisien positif sebesar 0,287. Temuan Chintya (2015) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil tersebut sejalan dengan temuan Gurendrawati, dkk (2014) dan Destriyani (2015) bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Daerah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Kompetensi aparatur pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap efektifnya instansi pemerintah, baik berpengaruh pada kinerja instansi maupun individu. Efektifitas dan efisiensi instansi pemerintah dapat tercapai apabila aparatur yang ada memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai dan sesuai aturan. Aparatur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi tinggi akan melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan berusaha memberikan yang terbaik. Sehingga semakin tinggi kompetensi aparatur pemerintah daerah akan semakin tinggi kinerja instansi pemerintah yang dihasilkan.

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan hipotesis kedua ditolak. Dibuktikan dengan hasil uji signifikansi parsial menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,997 yang berarti lebih dari 0,05. Koefisien beta yang bernilai positif berarti arah pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja instansi pemerintah adalah positif. Penelitian ini juga didukung dengan data empiris yang menunjukkan dari 35 Organisasi Perangkat

Daerah di Kabupaten Kebumen bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah menghasilkan skor rata-rata sebesar 45,69 yang berada pada kriteria tinggi.

DiMaggio dan Powell (1983) dalam Gudono (2017) menjelaskan konsep mekanisme yang berlaku pada pilar Institutional Theory, yakni salah satunya mekanisme isomorfisma normatif berkaitan dengan paksaan untuk menjadi sama yang muncul dari profesi. Isomorfisma normatif menjelaskan bahwa dua aspek profesionalisasi merupakan sumber penting dari isomorfisma, yaitu pendidikan formal dan legitimasi. Skor rata-rata kompetensi aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen yang berada pada kriteria tinggi merupakan buah dari pemenuhan akan profesionalisasi yang muncul karena paksaan. Sehingga tingginya kompetensi aparatur pemerintah yang ada tidak berpengaruh pada kinerja instansi.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Akbar (2014) yang dalam hasil penelitiannya menghasilkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Mufarrokh, dkk (2015); Trihapsoro (2015); Destriyani (2015); Syahrums, dkk. (2016) bahwa adanya pengaruh langsung dari kompetensi terhadap kinerja organisasi, yang berarti semakin tinggi kompetensi, akan semakin tinggi pula kinerja.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Djalil, dkk. (2017) menjelaskan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh yang kuat dalam upaya mencegah penipuan dan penyimpangan yang ada dalam suatu organisasi. Sistem pengendalian internal berperan untuk menghindari penipuan dan pelanggaran, juga dapat mempersempit ruang gerak aparatur pemerintah daerah yang tidak patuh

pada aturan tugas. Oleh karena itu, sistem pengendalian yang dirancang sebaik mungkin dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bahwa sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan hipotesis ketiga ditolak. Dibuktikan dengan hasil uji signifikansi parsial menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,328 yang berarti lebih dari 0,05. Koefisien beta yang bernilai positif berarti arah pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah adalah positif. Penelitian ini juga didukung dengan data empiris yang menunjukkan dari 35 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen bahwa variabel sistem pengendalian internal menghasilkan skor rata-rata sebesar 120,14 yang berada pada kriteria tinggi.

Penerapan sistem pengendalian internal oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen adalah proses adopsi yang dilakukan karena adanya tekanan dari pemerintah pusat dan masyarakat. Di-Maggio dan Powell (1983) dalam Gudono, (2017) menjelaskan konsep mekanisme isomorfisma koersif (*coercive isomorphism*) yang merujuk pada proses dimana organisasi mengadopsi fitur (sifat) tertentu karena paksaan (tekanan) dari negara, organisasi lain, atau masyarakat. Bentuk tekanan berupa paksaan yang muncul tidak selalu formal dan paksaan yang dilakukan bisa menimbulkan ketaatan yang sesungguhnya ataupun yang semu oleh organisasi yang dituntut. Sistem pengendalian internal yang ditetapkan Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Kebumen dimungkinkan ketaatannya semua yang timbul karena paksaan. Sehingga tingginya perolehan skor rata-rata sistem pengendalian internal Organisasi Pemerintah Daerah

di Kabupaten Kebumen tidak berpengaruh pada kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Khikmah dan Zuhriyah (2017) bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Djalil, dkk (2017) yang menemukan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Kota Banda Aceh. Temuan Zodia (2015); Onyango (2014); Chintya (2015); Trihapsoro (2015); Destriyani (2015) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderating

Stewardship Theory mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Asumsi penting dari *stewardship* adalah pemerintah selaku manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan masyarakat selaku pemilik (Raharjo, 2007). Masyarakat memiliki peran aktif untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Rubin (1996) menjelaskan bahwa adanya partisipasi masyarakat akan meningkatkan tanggung jawab serta kinerja organisasi pemerintah daerah. Teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah dapat digunakan untuk menjadi wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Tingginya pemanfaatan teknologi informasi dengan didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, maka pemanfaatan teknologi informasi tersebut akan semakin kuat sehingga dapat memicu pemerintah daerah untuk

menghasilkan kinerja yang baik.

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan hipotesis keempat ditolak. Dibuktikan dengan hasil uji signifikansi parsial menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,159 yang berarti lebih dari 0,05. Koefisien beta yang bernilai positif berarti arah pengaruh interaksi pemanfaatan teknologi informasi dengan partisipasi masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah adalah positif. Penelitian ini juga didukung dengan data empiris yang menunjukkan dari 35 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen bahwa variabel partisipasi masyarakat menghasilkan skor rata-rata sebesar 39,49 yang berada pada kriteria tinggi.

Data empiris menunjukkan hasil bahwa analisis deskriptif partisipasi masyarakat termasuk dalam kriteria tinggi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menganggap partisipasi masyarakat yang ada tinggi. Peneliti menilai tingginya pemanfaatan teknologi informasi yang ada hanya sekedar menunjang aktivitas pemerintahan. Instansi belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam ruang masyarakat dan dari sisi masyarakat pun belum mampu memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang telah disediakan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tidak memperkuat atau memperlemah pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Daerah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderating

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan hipotesis kelima diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji signifikansi parsial menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,023 yang berarti kurang dari 0,05. Koefisien beta yang bernilai positif berarti arah pengaruh interaksi kompetensi aparatur pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah adalah positif. Secara parsial variabel interaksi kompetensi aparatur pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah sebesar 17,72%.

Stewardship Theory mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerjanya, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari stewardship adalah pemerintah selaku manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan masyarakat selaku pemilik (Raharjo, 2007). Aparatur pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki kompetensi yang tinggi. Aparatur pemerintah daerah dengan kompetensi tinggi akan melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan berusaha memberikan yang terbaik. Disisi lain, adanya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dapat memperkuat hubungan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja instansi pemerintah. Partisipasi masyarakat yang aktif mendorong aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensinya sebagai pelayan publik, maka kompetensi aparatur pemerintah daerah

tersebut akan semakin kuat sehingga dapat memicu pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Sehingga semakin tinggi kompetensi aparatur pemerintah daerah dengan didukung partisipasi masyarakat yang tinggi akan semakin tinggi kinerja instansi pemerintah yang dihasilkan.

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan hipotesis kelima diterima. Dibuktikan dengan hasil uji signifikansi parsial menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,023 yang berarti kurang dari 0,05. Koefisien beta yang bernilai positif berarti arah pengaruh interaksi kompetensi aparatur pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah adalah positif. Secara parsial variabel interaksi kompetensi aparatur pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah sebesar 17,72%. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat memperkuat hubungan kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderating

Teori stewardship memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah selaku steward dan masyarakat dimana pemerintah akan selalu bertindak sedemikian rupa untuk memberikan layanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memaksimalkan kepentingan masyarakat. Masyarakat memiliki

peran aktif untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kehadiran partisipasi masyarakat yang memberikan pengawasan dalam pemerintahan akan memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pada penerapan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, semakin baik sistem pengendalian internal dengan didukung partisipasi masyarakat yang tinggi akan menghasilkan kinerja instansi pemerintah yang semakin tinggi.

Hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bahwa sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan hipotesis keenam ditolak. Dibuktikan dengan hasil uji signifikansi parsial menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,026 yang berarti kurang dari 0,05. Namun koefisien beta yang bernilai negatif berarti arah pengaruh interaksi sistem pengendalian internal dengan partisipasi masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah adalah negatif. Secara parsial variabel interaksi sistem pengendalian internal dengan partisipasi masyarakat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah sebesar 17,06%.

Data empiris menunjukkan hasil bahwa analisis deskriptif partisipasi masyarakat di Kabupaten Kebumen termasuk dalam kriteria tinggi. Demikian juga sistem pengendalian internal juga dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tingginya sistem pengendalian internal dengan didukung partisipasi masyarakat yang tinggi menyebabkan melemahnya kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat memperlemah hubungan sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Moderating

Institutional theory, gagasan utamanya adalah bahwa organisasi dibentuk oleh lingkungan institusional yang mengitarinya dan dengan begitu pengamatan atas organisasi harus dilihat sebagai sebuah totalitas simbol, bahasa, ataupun ritual-ritual yang melingkupnya (Gudono, 2017). Menurut *stewardship theory* adanya hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Adanya faktor dari luar pemerintah daerah seperti partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dapat memperkuat hubungan pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal yang tinggi dengan didukung tingginya partisipasi masyarakat akan menghasilkan kinerja instansi pemerintah yang tinggi.

Hipotesis ketujuh yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan hipotesis ketujuh diterima. Dibuktikan dengan hasil uji signifikansi simultan menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Secara simultan pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, sistem pengendalian internal, dan variabel interaksi mempengaruhi kinerja instansi pemerintah

sebesar 59,7%. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat memperkuat hubungan pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

Dari tujuh hipotesis yang dirumuskan, hanya tiga hipotesis yang hasil penelitiannya dinyatakan diterima. Atas hasil tersebut maka disampaikan beberapa hal yang terjadi terkait data penelitian: (a) teknik pengumpulan data yang dilaksanakan terbatas hanya melalui kuesioner (angket) tanpa dilengkapi dengan wawancara mendalam atau teknik lain. Sehingga jawaban responden yang didapat belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan kemungkinan akan berbeda jika data diperoleh dengan cara wawancara mendalam atau teknik lain. (b) Instrumen yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini mengacu pada pengukuran diri sendiri, sehingga cenderung menimbulkan kemurahan hati dalam menilai kinerja sendiri. (c) Data penelitian ini merupakan hasil dari instrumen yang berdasarkan pada persepsi responden. Dari hal ini dapat menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya. (d) Metode penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan secara tidak langsung, yaitu dititipkan kepada pihak kedua yaitu Kepala Bagian Umum & Kepegawaian maka dari itu peneliti tidak dapat mengontrol secara langsung cara mengisi kuesioner yang tepat dan tingkat kebenaran dari hasil jawaban yang diberikan kepada responden. Dari hal itu, dapat membuat hasil jawaban responden yang bias, karena para responden dapat menjawab kuesioner secara normatif saja atau bahkan tidak memiliki respon yang diharapkan peneliti.

SIMPULAN

Simpulan penelitian ini yaitu: (1) pemanfaatan teknologi informasi ber-

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah, (2) kompetensi aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah, (3) sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah, (4) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating, (5) kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating, (6) sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating, (7) pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Jamaluddin. (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komunikasi Organisasi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya). *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UPN Veteran Jatim.
- Arens, Alvin A., Elder, & Beasley. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi* Jilid I, Edisi 12. Jakarta: Erlangga.
- Aziz, M. Rasyidin. (2014). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pelayanan Publik terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah melalui Good Government Governance sebagai Variabel Moderat. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Chintya, Irine. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Solok (Studi pada SKPD Kota Solok). *Skripsi*. Padang: Fakultas Ekonomi UNP.
- Destriyani, Vini. (2015). Pengaruh Good Governance, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jom FEKON*, 2(2).
- DiMaggio, Paul J., & Powell, Walter W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism And Collective Rationality In Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2). 147-160.
- Djalil, Muslim A., Nadirsyah, Yahya, M. Rizal, Jalaluddin, & Ramadhanti, Syarifah Vivi. (2017). The Effect of Used Information Technology, Internal Control, and Regional Accounting System on the Performance of City Governance Agency of Banda Aceh City, Indonesia. *Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution*, 8 (1).
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gudono. (2014). *Teori Organisasi Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE.
- Gurendrawati, Etty, Murdayanti, Yunika, & Putri, Anindya Gita. (2014). The Impact Of Information Technology, Management Accounting System Characteristics, and Locus Of Control To The Managerial Performance In The Telecommunication Service Companies. *Review of Integrative Business Economics Research*, 4(1).
- Ilah, Faidlol, & Heri Yanto. (2016). Determinan Kinerja Manajerial Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. *Accounting Analysis Journal*, 5(1).

- Jogiyanto, Hartono. (2005). *Anilisis dan Desain Sistem Informasi*, Edisi III. Yogyakarta: Andi.
- Khikmah, Siti Noor, & Eni Zuhriyah. (2017). Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Kualiatas Sumber Daya Manusia terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi di Kabupaten Magelang. *The 6th University Research Colloquium 2017*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Mage- lang.
- Leach-López, Maria A., Stammerjohan, William W., & Rigsby Jr., John T. (2008). An Update On Budgetary Part- icipation, Locus Of Control, And The Effects On Mexican Managerial Performance And Job Satisfaction. *The Journal of Applied Business Research*, 24(3).
- Mohyi, Ach. (1999). *Teori dan Perilaku Or- ganisasi*. Malang: UMM Press.
- Mufarrokah, Sutrisno T, & Purnomosidhi, Bambang. (2013). Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, dan Kompe- tensi terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Kabupat- en Bangkalan). *Jurnal InFestasi*, 9(2). 123-136.
- Nazir, Azwir, & Oktari, Ranti. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi In- formasi Dan Pengendalian Intern Ter- hadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi*, 19(2).
- Oei, Sufenny Wijaya. (2016). Pengaruh Kesesuaian Tugas-Teknologi, Kualitas Informasi, Dan Kualitas Sistem Terhadap Kinerja Individu Pengguna Sistem ERP. *Skripsi*. Ma- kassar: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unhas.
- Onyango, Rhodah O. (2014). Influence Of Internal Controls On Performance Of County Governments In Kenya. *The- sis*. Nairobi University.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sis- tem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.
- Raharja, Gede Pose, Herawati, Nyoman Trisna, & Purnamawati, I Gusti Ayu. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Internal terhadap Kiner- ja Organisasi (Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1).
- Rubin, Irene. (1996). Budgeting for Ac- countability: The Effect of The Public Participation and Public Service on The Local Government Organization Performance. *Public Budgeting and Fi- nance Journal*.
- Surastiani, Dyah Puri, & Handayani, Bestari Dwi. (2015). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2).139-149.
- Syahrum, Andi, Brahmasari, Ida Aju, dan Nugroho, Riyadi. (2016). Effect of Competence, Organizational Culture and Climate of Organization to the Organizational Commitment, Job Sat- isfaction and the Performance of Em- ployees in the Scope of Makassar City Government. *International Journal of Business and Management Invention*, 5 (4). 52-64.
- Thompson, Ronald L, Haggings, Christo- pher A., dan Howell, Jane M. (1991). Personal Computing: Toward a Con- ceptual Model of Utilization. *MIS Quarterly*, 15(1). 125-143.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Trihapsoro, Argo. (2015). Pengaruh Quali- tas Sumber Daya Manusia, Pem-

- anfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali). *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMS.
- Wibowo. (2014). *Manajemen Kinerja*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Zodia, Adif Putra. (2015). Pengaruh Pem-anfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh). *Jom FEKON*, 2(2)